

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran yaitu meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, dan disusun secara sistematis menurut klasifikasi tertentu untuk satu periode yang digunakan sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah (Paat et al., 2019). Dalam merencanakan anggaran, diperlukan suatu sistem penganggaran. Menurut Alim (2008) sistem penganggaran merupakan prosedur yang terdiri dari seperangkat komponen anggaran yang meliputi penentuan sasaran anggaran, penyusunan anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran. Proses revisi anggaran merupakan kebijakan dan prosedur untuk merevisi sasaran anggaran baik secara reguler atau di bawah kejadian khusus (Kapuas & Carolina, 2012). Kebijakan dan prosedur untuk mengevaluasi antara sasaran dan realisasi disebut Evaluasi anggaran (Alim, 2008).

Pemerintah daerah menggunakan sistem anggaran dengan tujuan menghindari pengeluaran yang berlebihan serta membatasi pengeluaran dan disesuaikan dengan penerimaan. Artinya, sistem penganggaran digunakan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Misalnya untuk mengetahui bagaimana laju kesesuaian anggaran seperti realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mencermati pengelolaan anggaran belanja serta alokasinya.

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah harus dapat menilai perbandingan antara input yang telah digunakan dan output yang dihasilkan (Paat et al., 2019). Efektifitas dapat diukur melalui perbandingan antara input dengan output.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus dapat menilai perbandingan antara input dan output, untuk menilai keterserapan anggaran. Hal ini diperlukan agar Pemerintah daerah mampu menyerap anggaran secara optimal.

Dalam penganggaran, pemerintah Daerah dapat mengalami berbagai macam permasalahan. Menurut Sinaga (2016) salah satu permasalahan dalam penganggaran pemerintah daerah adalah rendahnya daya serap anggaran. Rendahnya daya serap anggaran daerah menjadi permasalahan setiap tahun di Indonesia. Khadafi (2020) menjelaskan ungkapan Presiden Jokowi pada saat pembukaan rapat terbatas dengan para Gubernur secara virtual, bahwa masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran yang berada di angka 15% bahkan 10%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penyerapan APBD di sejumlah daerah masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak Januari hingga Juni 2019, masih terdapat penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota yang tidak sampai 20% (Priansyah, 2020). Daerah dengan penyerapan anggaran yang rendah tersebut diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Natuna, dan Kepulauan Riau. Penyerapan anggaran dibawah 20% di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Riau, menggambarkan rendahnya daya serap anggaran di Kabupaten tersebut.

Kemampuan yang rendah dalam menyerap anggaran, juga dialami oleh Beberapa daerah di Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan daya serap anggaran, walaupun angka penyerapan sudah berada diatas 50%. Seperti di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, angka penyerapan anggaran sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 79,81% (Fajlin, 2020). Angka tersebut terbilang cukup baik dibanding daerah dengan realisasi anggaran dibawah 50%. Akan tetapi, serapan anggaran tersebut belum mencapai target. Dengan begitu, masih diperlukan upaya dalam mencapai target realisasi anggaran tersebut.

Badan Kesbangpol Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus ikut berupaya agar seluruh kegiatan dapat

selesai pada jadwal yang ditentukan. Daya serap anggaran Badan Kesbangpol Kota Semarang pada tahun 2019 mencapai 95,09% sedangkan tahun 2018 60,70% dan 2017 adalah sebesar 87,03%. Daya serap anggaran Badan Kesbangpol Kota Semarang masih mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai salah satu OPD yang harus ikut serta dalam pencapaian target realisasi anggaran tersebut sehingga daya serap serta pengelolaan anggaran Badan Kesbangpol Kota Semarang juga harus maksimal. Namun, selain dengan mengetahui bagaimana daya serap anggarannya, juga perlu diketahui bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran Badan Kesbangpol Kota Semarang.

Badan Kesbangpol Kota Semarang merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Semarang. Dalam pelaksanaan program, Badan Kesbangpol Kota Semarang, harus melalui proses penganggaran. Dalam Tugas Akhir ini, peneliti mengambil topik **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang”**. Peneliti menganalisis anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Semarang Periode 2017 sampai dengan 2019. Dalam Penelitian ini, Peneliti menganalisis penyebab naik atau turunnya efektivitas dan efisiensi anggaran belanja periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran pada periode selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Penyusunan anggaran harus berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan benar-benar sesuai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 31 tahun 2016, dalam menyusun anggaran pemerintah daerah harus taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam menyusun anggaran, Badan Kesbangpol Kota Semarang

harus mengacu pada ketentuan undang- undang tersebut. Realisasi anggaran yang baik tidak lepas dari penyusunan anggaran yang baik pula. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitisn ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja Badan Kesbangpol Kota Semarang?
2. Bagaimana realisasi anggaran belanja Badan Kesbangpol Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Badan Kesbangpol Kota Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran belanja Badan Kesbangpol Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Badan Kesbangpol Kota Semarang untuk merencanakan anggaran periode selanjutnya.
 - b. Memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja.